



Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Kota Palopo *Efforts to Organize Street Vendors on KH. Ahmad Dahlan Street, Palopo City*

Besse Widya Utami¹, Rudi Latief², Tri Budiharto¹, Rivqa Musjhtahida A¹

¹ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa, Makassar

² Program Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa, Makassar

bessewidyaautami@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima; 14-09-2024

Direvisi: 28-07-2025

Disetujui; 10-08-2025

Abstract. *This study aims to deepen the understanding of the study related to the efforts to organize street vendors so that it can be used as information and input material for the arrangement of street vendors on Jl. KH. Ahmad Dahlan, Palopo City. The sampling technique uses a purposive sampling technique where sampling is carried out according to criteria. The research methods used are qualitative descriptive and delphi analysis. The variables used are technology used, education level, business capital, labor, income, type of trader by nature, type of trader by trade, physical facilities of trade, selling location, public facilities, trading time, and distribution pattern.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang kajian terkait upaya penataan pedagang kaki lima sehingga dapat dijadikan bahan informasi dan masukan bagi penataan pedagang kaki lima di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kota Palopo. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling di mana pengambilan sampel dilakukan menurut kriteria. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan analisis delphi. Adapun variabel yang digunakan adalah teknologi yang dipakai, tingkat pendidikan, modal usaha, tenaga kerja, pendapatan, jenis pedagang menurut sifat, jenis pedagang menurut dagangan, sarana fisik dagangan, lokasi berjualan, fasilitas umum, waktu berdagang, dan pola penyebaran.

Keywords:

*Street; Vendors,
Structuring; Efforts.*

Corresponden author:

Email: bessewidyaautami@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

1. PENDAHULUAN

Sektor informal merupakan bagian penting dalam perekonomian perkotaan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu bentuk dominan dari sektor informal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), yang memiliki peran signifikan dalam menyediakan lapangan kerja, akses terhadap barang dan jasa murah, serta mendukung ekonomi keluarga berpendapatan rendah. Namun, aktivitas PKL kerap kali menimbulkan konflik dengan kepentingan tata ruang kota, terutama ketika mereka memanfaatkan trotoar, bahu jalan, atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat berdagang (Sari et al., 2023).

Keberadaan PKL tidak hanya menjadi fenomena sosial-ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan tata kelola kota. Ketidakteraturan penempatan dan operasional PKL berpotensi menurunkan kualitas estetika kota, menghambat arus lalu lintas, dan menimbulkan kesan kumuh. Kondisi inilah yang sering kali menyebabkan para PKL dipandang negatif oleh sebagian masyarakat dan pemangku kebijakan (Buana & Huda, 2023; Dhakal &

Adhikari, 2022). Meski demikian, dalam berbagai studi ditemukan bahwa penataan yang humanis dan partisipatif dapat mengoptimalkan kontribusi PKL terhadap perekonomian tanpa harus mengorbankan fungsi ruang kota (Ahmadova & Yamaçlı, 2022; Aditya et al., 2020).

Sebaliknya, jika ditangani dengan pendekatan yang represif, upaya penertiban PKL justru memunculkan persoalan baru, seperti pengangguran, konflik sosial, dan kehilangan akses ekonomi bagi kelompok marjinal (Rohwerder & Szyp, 2022). Oleh karena itu, pendekatan penataan PKL harus mempertimbangkan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan para PKL sebagai bagian dari komunitas kota yang sah dan produktif (Dana et al., 2022).

Di Kota Palopo, khususnya di Jl. KH. Ahmad Dahlan, fenomena aktivitas PKL berkembang secara masif. Jalan ini merupakan salah satu titik strategis kota yang menjadi pusat mobilitas dan interaksi ekonomi masyarakat. Namun, keberadaan PKL di kawasan ini menimbulkan permasalahan tersendiri, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga gangguan terhadap kebersihan dan keteraturan ruang publik. Ketidakhadiran kebijakan penataan yang sistematis dan partisipatif berisiko memperparah konflik antara kepentingan ekonomi informal dan tertib kota.

Penataan PKL tidak bisa dianggap sebagai proses sekadar pemindahan atau pengusuran, tetapi harus menjadi bagian dari desain tata ruang yang inklusif. Perencanaan yang berbasis data, keterlibatan masyarakat, dan dukungan infrastruktur menjadi kunci dalam menata keberadaan PKL secara berkelanjutan (Szetey et al., 2021). Selain itu, pentingnya mengintegrasikan aspek legalitas, keamanan, dan akses terhadap fasilitas dasar juga harus diperhatikan agar para PKL dapat berdagang secara tertib dan layak tanpa mengganggu fungsi ruang kota.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai respons atas dinamika pertumbuhan aktivitas PKL yang belum diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan yang memadai. Melalui studi ini, peneliti ingin mengidentifikasi permasalahan aktual yang dihadapi PKL di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Palopo, serta merumuskan alternatif penataan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan penataan PKL yang adil dan efektif.

Dengan adanya studi ini, diharapkan pula dapat memperkuat literatur terkait penataan sektor informal di ruang kota, khususnya dalam konteks kota-kota kecil dan menengah di Indonesia. Mengingat bahwa sebagian besar literatur masih berfokus pada kota-kota metropolitan, maka riset yang mengangkat konteks lokal seperti Kota Palopo dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang dinamika dan tantangan penataan PKL dalam kerangka tata kelola perkotaan yang inklusif.

Pemerintah Kota Palopo dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Pasal 3 Bab III tentang Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat (1) dan ayat (3) masing-masing menerangkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang milik jalan dan setiap orang dilarang berusaha atau berjualan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalan, bahu jalan, dan fasilitas umum yang bukan peruntukannya. Jelas bahwa Pemerintah Kota Palopo telah berupaya menata dengan cara menertibkan para PKL melalui Peraturan Daerah Kota Palopo. Namun, tak jarang peraturan tersebut masih sering ditemui pelanggaran oleh para PKL yang hendak mencari penghidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya khusus dalam menata para PKL.

Menata PKL merupakan suatu tugas yang melibatkan koordinasi antara pemerintah setempat, pedagang, dan masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan dianggap kunci untuk membuat kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan sehingga diharapkan dalam mengambil suatu kebijakan terkait dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima tidak melupakan pelaku ekonomi informal khususnya dalam hal ini para PKL agar dapat menciptakan kondisi di mana kota diatur dan dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku.

2. METODE

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada koridor Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait dinamika dan strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kota Palopo. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman langsung dari para pelaku PKL, masyarakat sekitar, serta pemangku kebijakan secara komprehensif dalam konteks sosial perkotaan. Menurut beberapa ahli, pendekatan kualitatif sangat efektif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena

sosial yang kompleks dan kontekstual, terutama yang melibatkan interaksi manusia dalam ruang publik (Girard et al., 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan pedagang kaki lima, aparat pemerintah daerah, serta warga setempat. Selain itu, digunakan pula teknik survei dan penyebaran kuesioner secara purposive untuk memperoleh data persepsi dan preferensi masyarakat terhadap penataan PKL. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan, studi terdahulu, serta regulasi yang mengatur keberadaan dan penataan PKL. Kombinasi teknik pengumpulan data ini memungkinkan triangulasi informasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Bekbolatova et al., 2024).

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis sesuai dengan prosedur analisis tematik. Dalam analisis ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan, kemudian mengaitkannya dengan teori dan temuan studi sebelumnya. Teknik ini dinilai efektif dalam kajian kebijakan dan tata ruang kota karena mampu mengungkap relasi kuasa, konflik kepentingan, serta implikasi sosial dari suatu kebijakan penataan ruang (Heinrich et al., 2022; Barber, 2023). Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi aktual dan solusi strategis dalam penataan PKL yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik, permasalahan, serta potensi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Palopo. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan spasial yang terjadi di lapangan, khususnya berkaitan dengan interaksi antara aktivitas informal dan tata kelola ruang kota (Perera & Coorey, 2022). Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan dikaji untuk menemukan pola, kategori, serta hubungan antar komponen yang relevan dengan penataan PKL.

Dalam proses analisis data, digunakan dua teknik utama, yaitu analisis deskriptif kualitatif dan metode Delphi. Analisis deskriptif digunakan pada tahap awal untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan karakteristik PKL, termasuk jenis dagangan, waktu operasional, lokasi aktivitas, serta pola persebaran. Teknik ini membantu menggambarkan kondisi eksisting secara rinci sebagai dasar dalam merumuskan strategi penataan (Kogetsidis, 2023). Selanjutnya, metode Delphi digunakan untuk merumuskan kriteria dan arahan penataan PKL secara partisipatif melalui tahapan konsultatif dengan para ahli dan pemangku kepentingan. Metode ini efektif untuk mengumpulkan konsensus dari para responden yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan perkotaan, perencanaan wilayah, dan ekonomi informal (Slave et al., 2023).

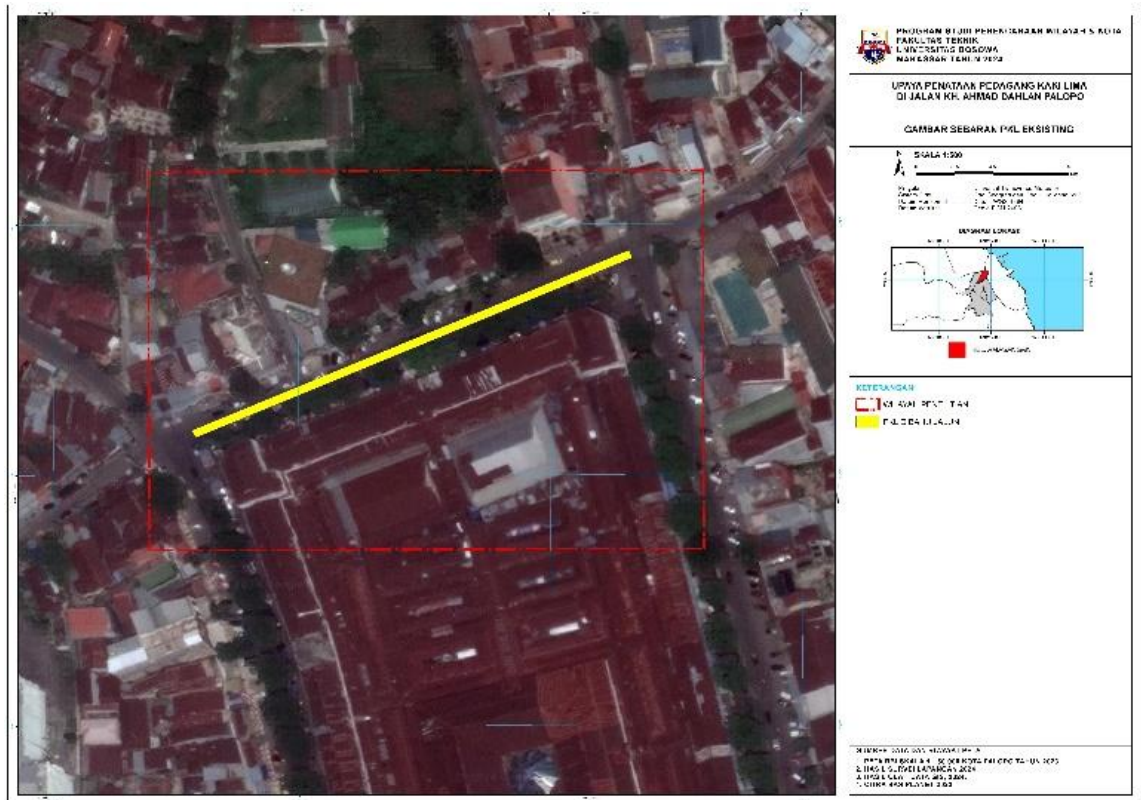
Alur penelitian ini terdiri atas tiga tahap utama. Pertama, identifikasi karakteristik PKL di sekitar Jl. KH. Ahmad Dahlan menggunakan analisis deskriptif. Kedua, perumusan kriteria penataan PKL melalui pendekatan Delphi yang melibatkan diskusi panel secara bertahap untuk mencapai konsensus terhadap indikator penataan yang ideal. Ketiga, perumusan arahan strategis penataan PKL berdasarkan sintesis hasil analisis sebelumnya. Kombinasi pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi penataan yang kontekstual, berbasis data, serta dapat diterima oleh berbagai pihak yang terlibat (Machado de Oliveira et al., 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Amassangan adalah kelurahan yang ada di Kecamatan Wara. Memiliki luas wilayah 1.28 ha yang dihuni sekitar 3.471 jiwa terdiri dari laki-laki 1.641 jiwa dan perempuan 1.830 jiwa. Kelurahan Amassangan mempunyai tipologi perdagangan dan jasa. Adapun batas administratif wilayah penelitian adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara	: Kelurahan Batupasi
Sebelah Selatan	: Kelurahan Surutanga
Sebelah Timur	: Kelurahan Salotellue
Sebelah Barat	: Kelurahan Boting



Gambar 1. Peta Eksisting Wilayah Penelitian

Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Palopo berada pada koridor jalan yang mengitari Pusat Niaga Palopo, terletak di sebelah utara PNP (Pusat Niaga Palopo) dan secara administratif memiliki batasan sebagai berikut.

Sebelah Utara : Jl. Manennungeng
Sebelah Selatan : Jl. Mangga, Jl. Ambe Nona
Sebelah Timur : Jl. Rambutan
Sebelah Barat : Jl. Nanakan

Kawasan sekitar Jl. KH. Ahmad Dahlan merupakan salah satu pusat kegiatan jual-beli atau perdagangan di Kota Palopo. Dengan adanya kegiatan perniagaan yang ramai tersebut, kawasan ini masih menjadi titik yang ramai dikunjungi oleh masyarakat yang dengan demikian kawasan tersebut dapat memberi kontribusi penting bagi perkembangan Kota Palopo. Selain banyak pertokoan, PKL, dan tempat perniagaan, terdapat pula fasilitas peribadatan (masjid). Namun, fungsi ini tidak begitu dominan karena yang dominan adalah fungsi perdagangan dan jasa.

Tumbuhnya fungsi perdagangan dan jasa di depan asrama kodim 1403 sawerigading sedikit mengganggu kenyamanan aktivitas pengguna jalan. Banyaknya PKL dan sektor informal yang tersebar di ruas jalan menyebabkan pemanfaatan Damija (Daerah Milik Jalan) atau Rumija (Ruang Milik Jalan) sehingga fungsi perniagaan melebar hingga ke badan jalan. Oleh sebab tidak adanya imbalan penyediaan lahan parkir serta ruang berjualan yang memadai, maka kegiatan jual-beli pun sampai ke Damija dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

3.2. Mengidentifikasi Karakteristik PKL di Sekitaran Jl. KH. Ahmad Dahlan

Tabel 1.

Variabel	Buah	Sayur	Makanan Dan Minuman	Telur	Ayam
Teknologi Yang Dipakai	Tidak Memakai Teknologi Tertentu, Hanya Menggunakan Timbangan Untuk	Tidak Memakai Teknologi Tertentu, Hanya Menggunakan Kalkulator Untuk	Menggunakan Mesin Press Minuman Dalam Berjualan. Mereka Juga	Menggunakan Kalkulator Untuk Membantu Menghitung	Tidak Menggunakan Teknologi Apapun.

Variabel	Buah	Sayur	Makanan Dan Minuman	Telur	Ayam
	Menghitung Berat Buah.	Membantu Menghitung Belanjaan Pembeli.	Menggunakan Kompor Atau Box Pendingin.	Belanjaan Pembeli.	
Tingkat Pendidikan	Sebagian Besar Pedagang Buah Mengenyam Pendidikan Terakhir SD, SMP, Dan SMA.	Sebagian Besar Pedagang Sayur Mengenyam Pendidikan Terakhir, Yaitu SMA Dan SMP. Sementara Lainnya Tidak Bersekolah.	Sebagian Besar Pedagang Buah Mengenyam Pendidikan Terakhir SD, SMP, Dan SMA.	Sebagian Besar Pedagang Telur Mengenyam Pendidikan Terakhir SMA.	Sebagian Besar Pedagang Ayam Mengenyam Pendidikan Terakhir SD.
Modal Usaha	Modal Usaha 2,5 Juta -5 Juta Merupakan Kelompok Pedagang Buah.	Modal Usaha $\leq$ 1 Juta – 2,5 Juta Merupakan Kelompok Pedagang Sayur	Modal Usaha $\geq$ 1 Juta – 2,5 Juta Merupakan Kelompok Pedagang Makanan Dan Minuman.	Modal Usaha 2,5 Juta -5 Juta Merupakan Kelompok Pedagang Telur.	Modal Usaha 2,5 Juta -5 Juta Merupakan Kelompok Pedagang Ayam.
Tenaga Kerja	Berjualan Secara Pribadi Atau Mandiri Dan Tidak Dibantu Oleh Orang Lain.	Berjualan Secara Pribadi Atau Mandiri Dan Tidak Dibantu Oleh Orang Lain.	Berjualan Secara Pribadi Atau Mandiri Dan Tidak Dibantu Oleh Orang Lain.	Berjualan Secara Pribadi Atau Mandiri Dan Tidak Dibantu Oleh Orang Lain.	Berjualan Secara Pribadi Atau Mandiri Dan Tidak Dibantu Oleh Orang Lain.
Pendapatan	Pendapatan Yang Diperoleh Berkisar 100 Ribu – 200 Ribu.	Pendapatan Yang Diperoleh Berkisar 50 Ribu – 100 Ribu.	Pendapatan Yang Diperoleh Berkisar 50 Ribu – 100 Ribu.	Pendapatan Yang Diperoleh Berkisar 200 Ribu – 500 Ribu.	Pendapatan Yang Diperoleh Berkisar 100 Ribu – 200 Ribu.
Jenis Pedagang Menurut Sifat	Pedagang Merupakan Pedagang Tetap. Mereka Berjualan Di Sekitaran Jl. KH. Ahmad Dahlan Dari Pagi Hari Hingga Sore Hari.	Pedagang Merupakan Pedagang Tetap. Mereka Berjualan Di Sekitaran Jl. KH. Ahmad Dahlan Dari Pagi Hari Hingga Sore Hari.	Mayoritas Pedagang Merupakan Pedagang Tetap Sementara Berjualan Di Sekitaran Jl. Pedagang Lainnya Adalah Pedagang Tidak Tetap Atau Berpindah. Jika Dirasa Sudah Tidak Ramai, Maka Mereka Akan Kembali Berkeliling.	Pedagang Merupakan Pedagang Tetap. Mereka Berjualan Di Sekitaran Jl. KH. Ahmad Dahlan Dari Pagi Hari Hingga Sore Hari.	Pedagang Merupakan Pedagang Tetap. Mereka Berjualan Di Sekitaran Jl. KH. Ahmad Dahlan Dari Pagi Hari Hingga Sore Hari.
Jenis Pedagang Menurut Dagangan	Jenis Dagangan Adalah Buah-Buahan Lokal Dan Impor.	Jenis Dagangan Adalah Sayur-Sayuran.	Jenis Dagangan Adalah Makanan Dan Minuman Dingin.	Jenis Dagangan Adalah Telur.	Jenis Dagangan Adalah Ayam.
Sarana Fisik Dagangan	Mayoritas Pedagang Menggunakan Mobil Bak Terbuka Sebagai Sarana Fisik	Mayoritas Menggunakan Rak Atau Meja Yang Terbuat Dari Kayu Sementara	Mayoritas Pedagang Menggunakan Rak Atau Meja Sementara Lainnya	Mayoritas Pedagang Menggunakan Mobil Bak Terbuka	Mayoritas Menggunakan Rak Yang Di Atasnya Diletakkan

Variabel	Buah	Sayur	Makanan Dan Minuman	Telur	Ayam
Lokasi Berjualan	Dagangan. Sementara Lainnya Terlihat Menggunakan Rak Atau Meja Yang Terbuat Dari Kayu. Memilih Lokasi Di Pinggir Jalan Dan Badan Jalan.	Lainnya Menggunakan Terpal Yang Digelar Di Jalan. Memilih Lokasi Di Pinggir Jalan Dan Badan Jalan.	Menggunakan Gerobak. Memilih Lokasi Berjualan Yang Mudah Dijangkau Konsumen Seperti Di Pinggir Jalan.	Sebagai Sarana Fisik Dagangan. Memilih Lokasi Di Pinggir Jalan Dan Badan Jalan.	Kurungan Ayam. Memilih Lokasi Di Pinggir Jalan Dan Badan Jalan.
Fasilitas Umum	Tidak Ada Fasilitas Umum Yang Tersedia. Yang Dapat Dijumpai Hanya Masjid Yang Halamannya Digunakan Sebagai Tempat Parkir Serta Badan Jalan Yang Kosong Yang Juga Digunakan Sebagai Tempat Parkir.	Tidak Ada Fasilitas Umum Yang Tersedia. Yang Dapat Dijumpai Hanya Masjid Yang Halamannya Digunakan Sebagai Tempat Parkir Serta Badan Jalan Yang Kosong Yang Juga Digunakan Sebagai Tempat Parkir.	Tidak Ada Fasilitas Umum Yang Tersedia. Yang Dapat Dijumpai Hanya Masjid Yang Halamannya Digunakan Sebagai Tempat Parkir Serta Badan Jalan Yang Kosong Yang Juga Digunakan Sebagai Tempat Parkir.	Tidak Ada Fasilitas Umum Yang Tersedia. Yang Dapat Dijumpai Hanya Masjid Yang Halamannya Digunakan Sebagai Tempat Parkir Serta Badan Jalan Yang Kosong Yang Juga Digunakan Sebagai Tempat Parkir.	Tidak Ada Fasilitas Umum Yang Tersedia. Yang Dapat Dijumpai Hanya Masjid Yang Halamannya Digunakan Sebagai Tempat Parkir Serta Badan Jalan Yang Kosong Yang Juga Digunakan Sebagai Tempat Parkir.
Waktu Berdagang	Pukul 06.00 – 17.00	Pukul 06.00 – 17.00	Pukul 06.00 – 17.00	Pukul 06.00 – 17.00	Pukul 06.00 – 17.00
Pola Penyebaran	Linear Atau Mengikuti Panjang Jalan.	Linear Atau Mengikuti Panjang Jalan.	Linear Atau Mengikuti Panjang Jalan.	Linear Atau Mengikuti Panjang Jalan.	Linear Atau Mengikuti Panjang Jalan.

Sumber: Hasil analisis, 2024

Setelah mengetahui hasil kuesioner dan karakteristik dari 5 jenis pedagang yang berjualan di sekitaran Jl. KH. Ahmad Dahlan melalui 12 variabel, diperoleh 2 tipologi karakteristik pedagang, yaitu:

- Tipologi pedagang yang berjualan di bahu jalan dan memerlukan space luas, tipologi pedagang yang mempunyai besar dimensi sarana berdagang seluas 2x2 dan jarak antar pedagang 1-2m.
- Tipologi pedagang yang berjualan di bahu jalan dan memerlukan space sedang, tipologi pedagang yang mempunyai besar dimensi sarana berdagang seluas 2x1 dan jarak antar pedagang 1m.

3.3. Merumuskan Arah Penataan Lokasi Berjualan PKL di Sekitar Jl. KH. Ahmad Dahlan

Setelah dilakukan identifikasi terhadap tipologi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penetapan kriteria penataan melalui metode Delphi, tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah merumuskan arah penataan lokasi berjualan PKL di sekitar Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Palopo. Perumusan ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara, serta data kuantitatif dan kualitatif yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Tipologi PKL yang teridentifikasi menunjukkan keberagaman dalam jenis komoditas, waktu operasional, dan bentuk sarana dagang. Hal ini penting dalam menentukan model penataan yang sesuai, karena tidak semua PKL dapat diperlakukan dengan pendekatan yang seragam. Penelitian oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa klasifikasi yang tepat terhadap PKL memungkinkan pemerintah kota menyusun strategi penataan yang lebih efektif dan berkeadilan sosial (Samsul et al., 2022). Dalam konteks Jl. KH. Ahmad Dahlan, terdapat tiga kelompok

besar PKL: PKL harian yang menetap, PKL musiman, dan PKL semi-mobile, yang masing-masing memerlukan pendekatan penataan berbeda.

Hasil metode Delphi dengan melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan menghasilkan beberapa kriteria utama dalam penataan lokasi, yakni aksesibilitas, tidak mengganggu fungsi utama ruang publik, keberadaan infrastruktur pendukung (seperti drainase dan sanitasi), serta kepastian hukum dalam penempatan lokasi berdagang. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh beberapa ahli, yang menegaskan bahwa penataan PKL akan berhasil jika mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan infrastruktur dasar, serta relasi antara PKL dan ruang kota secara berkelanjutan (Ahmad et al., 2022).

Arahan penataan yang dirumuskan mengacu pada prinsip integratif dan inklusif. Beberapa rekomendasi utama meliputi: penetapan zona berdagang yang legal dan terorganisir pada ruang semi-publik yang tidak mengganggu arus lalu lintas; penyediaan shelter atau lapak temporer dengan desain modular; serta pembentukan unit pengelola PKL berbasis komunitas yang dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dan para pedagang. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antarpihak dan perencanaan berbasis konsensus, sebagaimana disarankan oleh dalam beberapa studi mereka tentang penataan informalitas di ruang urban (Soliman, 2021) (Lehmann, 2020).

Melalui kombinasi pendekatan deskriptif dan partisipatif ini, penataan PKL di Jl. KH. Ahmad Dahlan diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan keteraturan kota, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan secara inklusif. Selain itu, pendekatan berbasis data dan kontekstual memungkinkan kebijakan penataan lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat urban (Navarro-Yáñez & Rodríguez-García, 2020).

Tabel 2. Arahan Tipologi 1

No.	Variabel	Kriteria	Arahan
1.	Penggunaan Teknologi	Menggunakan Teknologi Besar Seperti Mesin Pres, Box Pendingin, Dan Peralatan Lainnya Yang Memerlukan Ruang Besar.	Mengakomodasi Pedagang Yang Menggunakan Teknologi Besar, Seperti Mesin Pres, Kulkas Besar, Dan Alat Produksi Lainnya. Alokasi Ruang Harus Mencakup Area Untuk Mesin Dan Alat Berat Lainnya.
2.	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Minimal Sma Atau Lebih Tinggi, Memungkinkan Pengelolaan Teknologi Dan Usaha Yang Lebih Kompleks.	Perlu Disediakan Program Edukasi Dan Pelatihan Untuk Pedagang Dengan Pendidikan Rendah Agar Lebih Siap Mengelola Teknologi Dan Operasional Usaha Dengan Modal Besar.
3.	Modal Usaha	Modal Usaha Yang Besar, Biasanya Lebih Dari 2,5 Juta Rupiah Untuk Investasi Pada Teknologi Dan Sarana Fisik.	Pedagang Dengan Modal Besar Perlu Disediakan Area Dengan Potensi Lalu Lintas Tinggi Untuk Memaksimalkan Pendapatan, Serta Akses Mudah Ke Sumber Modal Seperti Bank Atau Koperasi.
4.	Tenaga Kerja	Memiliki Tenaga Kerja Tambahan, Setidaknya 2-3 Orang Untuk Membantu Operasional Usaha.	Penyediaan Area Yang Memungkinkan Untuk Penempatan Tenaga Kerja Lebih Dari 2 Orang, Dengan Fasilitas Pendukung Seperti Ruang Istirahat Atau Tempat Penyimpanan Barang Dagangan.
5.	Pendapatan	Pendapatan Harian Yang Tinggi, Terutama Pada Waktu-Waktu Tertentu Seperti Menjelang Hari Raya Atau Musim Ramai.	Penataan Lokasi Di Daerah Strategis Yang Ramai Agar Pendapatan Pedagang Tinggi Dan Stabil, Terutama Pada Hari-Hari Ramai Dan Musim Tertentu. Area Yang Disiapkan Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Produksi Yang Lebih Tinggi.

No.	Variabel	Kriteria	Arahan
6.	Jenis Pedagang Menurut Sifat	Cenderung Menetap Di Lokasi Yang Memungkinkan Penggunaan Space Luas Secara Permanen.	Pedagang Yang Menetap Perlu Area Khusus Yang Permanen, Seperti Lokasi Dengan Bangunan Semi-Permanen Atau Kios, Agar Tidak Perlu Berpindah-Pindah Dan Dapat Membangun Basis Pelanggan Yang Konsisten.
7.	Jenis Pedagang Menurut Dagangan	Menjual Barang Dalam Volume Besar Atau Yang Memerlukan Ruang Tambahan, Seperti, Sayur-Mayur Dan Buah.	Barang Dagangan Besar, Seperti Sembako, Daging, Atau Produk Dengan Volume Besar Memerlukan Alokasi Space Luas Dengan Tempat Penyimpanan Tambahan Serta Akses Langsung Ke Jalan Atau Area Distribusi.
8.	Sarana Fisik Dagangan	Sarana Fisik Yang Besar Dan Kompleks, Seperti Tenda Besar, Tempat Penyimpanan, Dan Area Display Luas.	Memastikan Ketersediaan Ruang Untuk Alat Berat Seperti Gerobak Besar, Mesin Pendingin, Dan Etalase Besar. Ruang Harus Cukup Untuk Menyimpan Stok Dalam Jumlah Besar Dan Alat Produksi Besar.
9.	Lokasi Berjualan	Berjualan Di Lokasi Dengan Space Luas Seperti Pasar Besar, Area Terbuka Yang Memungkinkan Penempatan Peralatan Besar.	Menyediakan Lokasi Yang Strategis Dan Luas, Seperti Pusat Pasar Atau Area Terbuka Yang Ramai, Dengan Akses Mudah Bagi Kendaraan Pengangkut Barang Dan Pembeli, Serta Lahan Parkir Yang Memadai.
10.	Fasilitas Umum	Membutuhkan Fasilitas Umum Yang Lengkap, Seperti Area Parkir, Tempat Sampah Besar, Dan Akses Yang Mudah.	Fasilitas Yang Memadai Seperti Air, Listrik Dengan Daya Besar, Dan Keamanan Perlu Disediakan. Area Khusus Untuk Sanitasi Dan Kebersihan, Serta Fasilitas Pengelolaan Limbah Juga Penting.
11.	Waktu Berdagang	Berdagang Dalam Jam Panjang, Mulai Dari Subuh Hingga Sore Atau Malam Hari.	Waktu Berdagang Yang Lebih Fleksibel Perlu Diberikan, Memungkinkan Pedagang Beroperasi Lebih Lama Atau Mengikuti Jam Puncak Keramaian, Seperti Malam Hari. Penataan Tempat Harus Mengakomodasi Operasional Sepanjang Waktu.
12.	Pola Penyebaran	Cenderung Menetap Di Satu Lokasi Yang Tetap Karena Membutuhkan Space Yang Luas Dan Permanen.	Penataan Yang Memungkinkan Penyebaran Yang Lebih Stabil Di Area Yang Sudah Ditentukan Dengan Zoning Yang Jelas, Agar Tidak Mengganggu Pedagang Lainnya Dan Memungkinkan Pertumbuhan Bisnis Jangka Panjang.

Sumber: Hasil analisis, 2024

Tipologi 1 menggambarkan profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah bertransformasi dari aktivitas informal tradisional menuju bentuk usaha semi-formal dengan skala ekonomi lebih besar dan penggunaan teknologi yang relatif maju. Pedagang dalam kategori ini menggunakan peralatan modern seperti mesin pres, kulkas, freezer, hingga rak penyimpanan besar. Kondisi ini menuntut penyediaan ruang dagang yang tidak hanya luas, tetapi juga memiliki struktur fisik yang kuat untuk menampung beban alat berat dan mendukung intensitas

kegiatan produksi. Studi oleh beberapa ahli menekankan bahwa keberhasilan penataan PKL sangat bergantung pada kecocokan antara kapasitas fisik ruang dan kebutuhan fungsional pedagang (Duchin et al., 2025).

Dari segi sumber daya manusia, pedagang pada tipologi ini umumnya memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas (minimal SMA), yang membuat mereka lebih siap dalam mengelola sistem usaha modern, termasuk pengoperasian teknologi dan pengelolaan keuangan usaha. Meski demikian, peningkatan kapasitas melalui pelatihan kewirausahaan dan literasi digital tetap diperlukan agar kelompok pedagang dengan latar pendidikan lebih rendah juga dapat beradaptasi. Sejalan dengan temuan dari beberapa penelitian, pelatihan berbasis kebutuhan sangat efektif dalam meningkatkan daya saing PKL yang berada di transisi antara informal dan formal (Komar et al., 2023; Darus et al., 2022).

Modal usaha yang dimiliki oleh pedagang dalam tipologi ini juga tergolong besar, yaitu di atas Rp2,5 juta, sehingga lokasi berjualan ideal bagi mereka adalah yang memiliki konektivitas tinggi dengan lembaga keuangan seperti bank, koperasi, atau lembaga pembiayaan mikro. Lokasi yang strategis juga berperan penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan peningkatan omzet. Menurut beberapa ahli, akses terhadap pembiayaan dan infrastruktur pendukung adalah dua faktor utama dalam keberhasilan usaha informal berskala besar di kawasan urban (Lorato et al., 2023).

Struktur usaha pedagang ini umumnya melibatkan 2–3 tenaga kerja tambahan, sehingga penataan ruang tidak hanya mencakup area untuk transaksi, tetapi juga ruang untuk penyimpanan, tempat istirahat staf, serta ruang logistik. Jenis dagangan yang dijual, seperti sembako, produk segar, atau daging, juga membutuhkan fasilitas penyimpanan dingin atau kering yang sesuai. Maka dari itu, rekomendasi penataan meliputi pembangunan kios permanen atau bangunan semi-permanen yang mampu menampung aktivitas bisnis secara stabil dan berkelanjutan (Abadie et al., 2024).

Fasilitas fisik seperti gerobak besar, area display produk, serta aksesibilitas kendaraan menjadi bagian penting dari sistem operasional PKL tipe ini. Penempatan ideal adalah di pasar besar atau ruang terbuka yang memungkinkan akses logistik yang efisien serta tersedia lahan parkir yang memadai. Aspek ini menguatkan temuan dari beberapa studi bahwa keberhasilan integrasi PKL dalam sistem tata kota sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur logistik dan kemudahan akses pasar (Li et al., 2023).

Jam operasional PKL tipe ini cenderung panjang, mulai dari subuh hingga malam hari. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas penunjang seperti penerangan jalan, sistem keamanan yang aktif, serta sanitasi yang layak menjadi komponen vital untuk mendukung aktivitas mereka. Zona perdagangan yang dirancang untuk kelompok ini perlu memperhatikan fleksibilitas waktu dan ketahanan infrastruktur agar dapat menampung dinamika aktivitas harian secara optimal (Maslanov, 2023).

Terakhir, pola penyebaran yang menetap dengan kebutuhan ruang tetap dan luas memerlukan perencanaan tata ruang yang jelas. Penataan yang baik mencakup zoning yang terorganisir, kejelasan batas area dagang, serta pembagian fungsi ruang agar tidak menimbulkan konflik dengan pedagang lainnya. Dalam konteks ini, pendekatan tata ruang berbasis fungsi dan partisipatif sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan usaha PKL dan keharmonisan ruang kota (Simanjuntak, 2023).

Tabel 3. Arahan Tipologi 2

No.	Variabel	Kriteria	Arahan
1.	Penggunaan Teknologi	Menggunakan Teknologi Sederhana Atau Tidak Memerlukan Teknologi Besar, Misalnya Alat-Alat Manual Atau Kecil.	Mengakomodasi Pedagang Dengan Peralatan Teknologi Sederhana Atau Berukuran Sedang, Seperti Mesin Kecil Atau Alat Pres Minuman Ringan. Ruang Perlu Cukup Untuk Peralatan Dan Aktivitas Dagang.
2.	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Minimal Smp Atau Sma, Cukup Untuk Mengelola Usaha Kecil Hingga Menengah.	Memastikan Adanya Informasi Dan Pelatihan Yang Sesuai Bagi Pedagang Dengan Tingkat Pendidikan Menengah, Untuk Meningkatkan Keterampilan Manajemen Dan Penggunaan Teknologi Dalam Skala Sedang.
3.	Modal Usaha	Modal Usaha Yang Sedang, Biasanya Antara 1 Juta Hingga	Alokasi Ruang Di Area Yang Memiliki Potensi Penghasilan Yang Cukup Tinggi Tetapi Tidak Terlalu

No.	Variabel	Kriteria	Arahan
		2,5 Juta Rupiah, Cukup Untuk Operasional Harian.	Mahal. Ini Memastikan Pedagang Dapat Berkembang Meskipun Dengan Modal Usaha Yang Terbatas.
4.	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Terbatas, Biasanya Hanya Dikelola Sendiri Atau Dengan 1-2 Orang Anggota Keluarga.	Menyediakan Ruang Yang Cukup Untuk Pedagang Dengan Tenaga Kerja 1-2 Orang, Serta Mempertimbangkan Fleksibilitas Ruang Untuk Penyimpanan Dan Penataan Barang Dagangan.
5.	Pendapatan	Pendapatan Harian Cukup Stabil, Tapi Tidak Terlalu Tinggi, Dan Dipengaruhi Oleh Fluktuasi Musiman.	Menempatkan Pedagang Di Area Yang Cukup Ramai Tetapi Tidak Terlalu Padat, Memungkinkan Mereka Memperoleh Pendapatan Yang Stabil Dan Cukup Untuk Mengembangkan Usahanya.
6.	Jenis Pedagang Menurut Sifat	Cenderung Semi Menetap, Bisa Berpindah Jika Diperlukan, Misalnya Mengikuti Keramaian Atau Acara Tertentu.	Pedagang Menetap Dan Semi-Permanen Memerlukan Area Yang Bisa Disesuaikan Dengan Aktivitas Harian, Seperti Kios Kecil Atau Tenda Semi-Permanen Yang Mudah Dibongkar Pasang.
7.	Jenis Pedagang Menurut Dagangan	Menjual Barang Yang Tidak Memerlukan Ruang Besar, Seperti Makanan Ringan, Minuman, Atau Produk-Produk Kecil.	Produk Dengan Volume Sedang Seperti Pakaian, Aksesoris, Atau Makanan Ringan Memerlukan Ruang Yang Memadai Untuk Menampilkan Dagangan Dan Menarik Perhatian Pembeli, Tanpa Mengganggu Pedagang Lain.
8.	Sarana Fisik Dagangan	Menggunakan Sarana Fisik Yang Sederhana, Seperti Gerobak Kecil, Meja Lipat, Atau Rak Dagangan Yang Mudah Dipindahkan.	Memastikan Ruang Cukup Untuk Sarana Fisik Seperti Gerobak Kecil Atau Meja Dagangan. Area Harus Mendukung Penataan Yang Rapi Dan Mudah Diakses Pembeli.
9.	Lokasi Berjualan	Berjualan Di Lokasi Yang Menyediakan Space Sedang, Seperti Pinggir Jalan, Depan Toko, Atau Area Parkir.	Menyediakan Lokasi Yang Strategis Tetapi Tidak Di Area Yang Sangat Padat. Lokasi Seperti Tepi Pasar, Jalan Masuk Ke Pusat Keramaian, Atau Area Penyangga Di Sekitar Pusat Pasar.
10.	Fasilitas Umum	Membutuhkan Fasilitas Umum Dasar, Seperti Akses Air, Tempat Sampah Kecil, Dan Tempat Duduk Untuk Pembeli.	Fasilitas Umum Yang Cukup Seperti Air Dan Listrik Yang Tidak Terlalu Besar, Serta Keamanan Dasar Dan Kebersihan. Penyediaan Area Teduh Atau Penutup Sementara Untuk Melindungi Dari Cuaca Juga Perlu Diperhatikan.
11.	Waktu Berdagang	Berdagang Dalam Jam Yang Fleksibel, Bisa Pagi Hingga Sore, Tergantung Pada Lokasi Dan Situasi.	Fleksibilitas Dalam Waktu Berdagang, Dengan Jam Operasional Yang Memungkinkan Adaptasi Dengan Aktivitas Sekitar, Seperti Berdagang Pagi Hingga Sore Di Daerah Yang Ramai Pada Jam Tersebut.
12.	Pola Penyebaran	Pola Penyebaran Dinamis, Bisa Berpindah-Pindah Sesuai	Penataan Yang Mengedepankan Keteraturan Dan Zoning Yang Fleksibel, Sehingga Pedagang

No.	Variabel	Kriteria	Arahan
		Dengan Potensi Penjualan Atau Mengikuti Keramaian Tertentu.	Dengan Space Sedang Tidak Menghalangi Lalu Lintas Dan Tetap Bisa Menarik Pembeli.

Sumber: Hasil analisis, 2024

Tipologi 2 merepresentasikan kelompok pedagang kaki lima dengan kapasitas usaha menengah ke bawah yang menjalankan aktivitas ekonomi menggunakan teknologi sederhana. Umumnya, mereka memanfaatkan alat manual atau mesin kecil seperti alat pres minuman ringan, kompor portable, atau rak dagang yang mudah dibongkar pasang. Meskipun kebutuhan ruang mereka tidak sebesar tipologi sebelumnya, namun tetap dibutuhkan alokasi ruang yang fleksibel dan efisien untuk menunjang operasional. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli, kelompok ini menunjukkan kecenderungan adaptif terhadap keterbatasan ruang dan teknologi, namun tetap memerlukan dukungan struktural untuk mempertahankan keberlanjutan usaha mereka (Abadie et al., 2024).

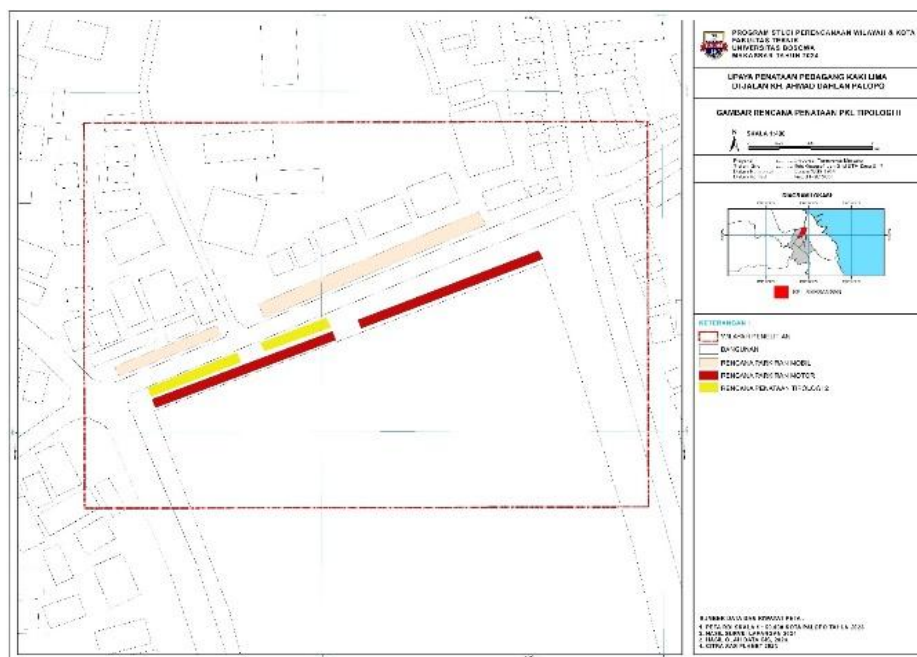
Dari sisi sumber daya manusia, pedagang dalam tipologi ini umumnya memiliki tingkat pendidikan SMP hingga SMA, yang cukup untuk mengelola usaha skala kecil, namun tetap rentan terhadap perubahan pasar dan keterbatasan pengetahuan manajerial. Oleh karena itu, program pelatihan teknis seperti pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan peningkatan efisiensi produksi menjadi sangat penting dalam membangun kapasitas mereka (Hitch et al., 2024). Modal usaha mereka berkisar antara Rp1–2,5 juta, yang memungkinkan operasional harian tetapi cukup sensitif terhadap tekanan biaya seperti sewa tempat atau pungutan liar. Penataan ruang untuk kelompok ini harus mempertimbangkan aspek keterjangkauan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pendukung, seperti air bersih, fasilitas sanitasi, dan tempat penyimpanan sederhana.

Struktur usaha tipologi ini sering kali dikelola oleh individu atau melibatkan bantuan anggota keluarga, menciptakan model ekonomi rumah tangga yang kuat tetapi informal. Oleh karena itu, desain ruang dagang harus hemat tempat namun tetap memberikan kenyamanan dan fungsionalitas dasar. Lokasi ideal bagi pedagang ini adalah kawasan dengan arus pengunjung menengah seperti depan toko, jalur pejalan kaki, atau zona transisi di dekat pasar, di mana mereka dapat mengakses konsumen tanpa menghadapi biaya tinggi atau persaingan yang terlalu ketat. Penelitian oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa penempatan PKL dalam area semiperiferial yang terintegrasi dengan alur mobilitas masyarakat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan (Budovic, 2023).

Karakteristik semi-menetap menjadi ciri khas dari tipologi ini, di mana pedagang cenderung mengikuti dinamika keramaian dan acara musiman di kota. Mereka membutuhkan ruang yang fleksibel, seperti kios ringan, meja lipat, atau tenda semi-permanen yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan. Jenis barang dagangan yang umum dijual meliputi makanan ringan, minuman, aksesoris, dan pakaian, yang tidak memerlukan ruang besar namun membutuhkan tampilan menarik dalam area yang terbatas. Hal ini mendukung argumen bahwa fleksibilitas desain sangat diperlukan dalam merancang zona PKL yang adaptif terhadap perubahan lokasi dan waktu (Brinck et al., 2020).

Sarana fisik seperti gerobak kecil, meja lipat, dan rak mini memperkuat identitas visual dan mobilitas pedagang tipologi ini. Penataan area dagang sebaiknya memperhatikan kemudahan akses pembeli dan pergerakan barang, termasuk ketersediaan ruang parkir sepeda motor atau area pejalan kaki yang lebar. Lokasi berjualan di jalur strategis namun tidak padat, seperti pinggir jalan sekunder atau depan pertokoan, menjadi solusi penataan yang efisien. Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan meliputi fasilitas dasar seperti tempat sampah kecil, air bersih, penerangan sederhana, dan tempat berteduh sementara. Elemen-elemen ini berperan dalam menciptakan lingkungan berdagang yang bersih dan aman, sesuai dengan prinsip penataan ruang publik yang inklusif (Abreha & Robertson, 2023).

Jam operasional pedagang dalam tipologi ini bersifat fleksibel, disesuaikan dengan ritme aktivitas lingkungan sekitar. Beberapa beroperasi pagi hingga siang, sementara lainnya aktif pada sore hingga malam hari. Sistem manajemen ruang yang adaptif diperlukan agar zona PKL tidak menimbulkan konflik pengguna ruang, serta dapat digunakan secara efisien oleh berbagai kelompok pedagang dalam rentang waktu berbeda. Terakhir, karena pola penyebaran pedagang ini bersifat dinamis, maka sistem zoning yang fleksibel namun terorganisir sangat penting untuk menjaga keteraturan dan mendukung mobilitas ekonomi urban (Bogomolov et al., 2023).



Gambar 2. Peta Tipologi 2

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pedagang kaki lima (PKL) di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa karakteristik PKL di kawasan tersebut mencakup dua belas variabel utama. Teknologi yang digunakan oleh para pedagang meliputi alat sederhana hingga semi-modern seperti timbangan, kalkulator, mesin pres, dan box pendingin. Tingkat pendidikan pedagang bervariasi, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Modal usaha berada pada kisaran Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000, dengan sebagian besar pedagang mengandalkan tenaga kerja mandiri. Pendapatan harian diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu Rp50.000–Rp100.000, Rp100.000–Rp200.000, dan Rp200.000–Rp500.000. Berdasarkan sifat usahanya, PKL terbagi menjadi pedagang permanen dan berpindah, dengan jenis barang dagangan meliputi buah, sayur, telur, ayam, serta makanan dan minuman. Sarana fisik dagang yang digunakan mencakup terpal, bangku atau rak, mobil bak terbuka, dan gerobak, dengan lokasi berjualan umumnya berada di badan jalan. Fasilitas umum yang tersedia masih sangat terbatas, hanya berupa masjid yang halamannya digunakan sebagai tempat parkir. Aktivitas berdagang berlangsung sejak pukul 05.00 hingga 18.00 WITA, dengan pola penyebaran cenderung linear mengikuti jalur jalan utama.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan dua kategori utama dalam upaya penataan PKL yang diklasifikasikan ke dalam Tipologi 1 dan Tipologi 2. Tipologi 1 terdiri atas pedagang sayur, ayam, serta makanan dan minuman, yang umumnya memiliki skala usaha lebih besar dan membutuhkan ruang yang luas. Oleh karena itu, arahan penataan untuk tipologi ini menekankan pada perlunya zonasi yang jelas dan alokasi ruang yang memadai guna menghindari konflik ruang dengan pedagang lain. Selain itu, aspek aksesibilitas, keamanan dan kenyamanan lalu lintas, serta ketersediaan fasilitas umum penunjang seperti tempat sampah dan sanitasi juga harus diperhatikan. Sementara itu, Tipologi 2 mencakup pedagang buah dan telur, yang memiliki kebutuhan ruang lebih kecil dan bersifat fleksibel. Penataan untuk tipologi ini harus berfokus pada efisiensi ruang dan memastikan bahwa area yang disediakan dapat menunjang kegiatan dagang tanpa mengganggu aliran pembeli maupun aktivitas publik lainnya. Oleh karena itu, lokasi berjualan harus strategis, namun tetap memperhatikan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan lingkungan, serta dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang mendukung seperti fasilitas kebersihan. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis tipologi dalam merancang kebijakan dan perencanaan ruang bagi PKL secara inklusif dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abadie, A., Chowdhury, S., Mangla, S. K., & Malik, S. (2024). Impact of carbon offset perceptions on greenwashing: Revealing intentions and strategies through an experimental approach. *Industrial Marketing Management*. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2024.01.001>
- Abreha, K., & Robertson, R. (2023). Heterogeneous trade agreements and adverse implications of restrictive rules of origin: Evidence from apparel trade. *The World Economy*. <https://doi.org/10.1111/twec.13486>

- Aditya, N. C., Natalia, T. W., Imaniar, L. N., & Astuti, S. (2020). Kampong KB Public Open Space Design Based on a Participatory. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/879/1/012160>
- Ahmad, A. L., Muhammad, A. K., Ali, N. E., Arip, M. S. M., & Azman, M. A. A. (2022). The Design of Spaces to Determine the Sustainability. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i7/14310>
- Ahmadova, S., & Yamaçlı, R. (2022). The Importance of Participatory Planning in Housing Design: The Example of Baku. *Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi*. <https://doi.org/10.51764/smutgd.1058574>
- Barber, R. (2023). Urban planning. <https://doi.org/10.4337/9781800377387.00017>
- Bekbolatova, M., Mayer, J., Ong, C. W., & Toma, M. (2024). Transformative Potential of AI in Healthcare: Definitions, Applications, and Navigating the Ethical Landscape and Public Perspectives. *Healthcare*. <https://doi.org/10.3390/healthcare12020125>
- Bogomolov, Yu. G., Belyi, A. G., Mikeš, O., & Sobolevsky, S. (2023). Urban Zoning Using Intraday Mobile Phone-Based Commuter Patterns in the City of Brno. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36808-0_35
- Brinck, J., Leinonen, T., Lipponen, L., & Kallio-Tavin, M. (2020). Zones of participation - a framework to analyse design roles in early childhood education and care (ECEC). *Codesign*. <https://doi.org/10.1080/15710882.2020.1812667>
- Buana, C., & Huda, N. (2023). Sarkasme dan ketidaksantunan berbahasa pada akronim ppkm di masa pandemi covid-19. *Kajian Linguistik Dan Sastra*. <https://doi.org/10.23917/kls.v8i1.22300>
- Budovic, A. (2023). Urban restructuring and the location dynamics of P-KIBS in postsocialist Belgrade. *Eurasian Geography and Economics*. <https://doi.org/10.1080/15387216.2023.2195415>
- Dana, I. W. G. K., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. wayan. (2022). Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Preferensi Hukum*. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4938.324-329>
- Darus, D., Ibrahim, A. B. bin, Dawi, A. H., & Selamat, A. Z. (2022). The Role of ‘Modul Pembinaan Karakter (MPK)’ in Building a Superior Personality in Trainees: a Case Study. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.690>
- Dhakal, B. P., & Adhikari, K. (2022). Policy Problems and Progressive Solutions to Halt Increasing Social Harms on Disadvantaged Rural Communities from Current Neo-Colonial Land Grabbing Policy in Nepal: Insights and Opinions. *Nepal Public Policy Review*. <https://doi.org/10.3126/nppr.v2i1.48686>
- Duchin, R., Gao, J., & Xu, Q. (2025). Sustainability or Greenwashing: Evidence from the Asset Market for Industrial Pollution. *The Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1111/jofi.13412>
- Girard, A., Arenella, K., Rider, G. N., Teoh, D., & Vogel, R. (2024). Gynecologic cancer survivor preferences for provider communication regarding sexual health after treatment: a qualitative study. *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4048751/v1>
- Heinrich, A. J., Million, A., & Zimmermann, K. (2022). Spatial Knowledge and Urban Planning. *Urban Planning*. <https://doi.org/10.17645/up.v7i3.6101>
- Hitch, G. J., Allen, R. J., & Baddeley, A. D. (2024). The multicomponent model of working memory fifty years on. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*. <https://doi.org/10.1177/17470218241290909>
- Kogetsidis, H. (2023). Dealing with complexity – the contribution of problem structuring methods to management science. *The International Journal of Organizational Analysis*. <https://doi.org/10.1108/ijoa-01-2023-3562>
- Komar, O., Sadikin, A., Sulistiono, E., & Sukmana, C. (2023). Need-based training planning for PKBM managers in Cimahi City during the Covid-19 pandemic. *Nucleation and Atmospheric Aerosols*. <https://doi.org/10.1063/5.0127604>
- Lehmann, S. (2020). The unplanned city: Public space and the spatial character of urban informality. <https://doi.org/10.35241/EMERALDOPENRES.13580.1>
- Li, Y., Huang, Y., & Gong, D. (2023). Analyzing the impacts of logistics suburbanization on logistics service accessibility: Accessibility modeling approach for urban freight. *Transport Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.05.001>

- Lorato, T., Tadesse, T., Mamo, Y. A., & Getinet, B. (2023). The urban informal sector as a means of livelihood improvement among youth: Evidence from Hawassa city, Ethiopia. *Cogent Economics & Finance*. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2185346>
- Machado de Oliveira, J., Machado de Oliveira, J., da Costa, C. A., & Antunes, R. S. (2021). Data structuring of electronic health records: a systematic review. *Health Technology*. <https://doi.org/10.1007/S12553-021-00607-W>
- Maslanov, E. V. (2023). Trading zones and boundary objects: To the typology. *Вестник Санкт-Петербургского Университета. Философия и Конфликтология*. <https://doi.org/10.21638/spbu17.2023.113>
- Navarro-Yáñez, C. J., & Rodríguez-García, M. J. (2020). Urban policies as multi-level policy mixes. The comparative urban portfolio analysis to study the strategies of integral urban development initiatives. *Cities*. <https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2020.102716>
- Perera, M. K., & Coorey, S. B. A. (2022, December 2). Spatial configuration and neighbourhood characteristics' impact on activities in informal spaces: a case study of Badulupitiya informal settlements in Badulla. <https://doi.org/10.31705/faru.2022.19>
- Rohwerder, B., & Szyg, C. (2022). The Risks and Outcomes of Getting Help for Marginalised People: Navigating Access to Social Assistance in Crises.
- Samsul, S., Peribadi, P., Arsyad, M., Tanzil, T. G., & Juhaepa, J. (2022). Tkpkd dan kemiskinan masyarakat pedesaan. *Ethnorefika : Jurnal Sosial Dan Budaya (e-Journal)*. <https://doi.org/10.33772/etnorefika.v1i12.1459>
- Sari, S. R., Darmawan, E., Murti, N. K., & Hilmy, M. F. (2023). Pengaruh keberadaan pkh terhadap pengguna jalan dan kualitas koridor jalan di Semarang. *Langkau Betang*. <https://doi.org/10.26418/lantang.v10i1.54358>
- Simanjuntak, B. H. (2023). Redesign Peningkatan Fungsi Mixed Use Area Jalan Jendral Soedirman Kota Salatiga melalui Re-desain Jalur Pedestrian. *JAL (Jurnal Arsitektur Lansekap)*. <https://doi.org/10.24843/jal.2023.v09.i01.p14>
- Slave, A.-R., Ioja, I.-C., Hossu, C. A., Grădinaru, S. R., Petrișor, A.-I., & Hersperger, A. M. (2023). Assessing public opinion using self-organizing maps. Lessons from urban planning in Romania. *Landscape and Urban Planning*. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104641>
- Soliman, A. M. (2021). The Paradigm of Urban Informality: Laws, Norms, and Practices. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68988-9_4
- Szetey, K., Moallemi, E. A., Ashton, E., Butcher, M., Sprunt, B., & Bryan, B. A. (2021). Participatory planning for local sustainability guided by the Sustainable Development Goals. *Ecology and Society*. <https://doi.org/10.5751/ES-12566-260316>